BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Provinsi Bali pertama kali didirikan pada tahun 1985 sebagai badan usaha milik desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 1 angka sembilan yang berbunyi "Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*".

Tujuan pendirian LPD untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, menciptakan pemerataan dan membuka kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Agar tujuan pendirian LPD terwujud maka diperlukan kinerja yang efektif dan efisien dari pengawas internal dalam pengelolaan operasional LPD berjalan dengan baik dan terhindar dari praktik yang tidak sehat.

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2000). Leach-Lopez (2013) menggambarkan kinerja sebagai tindakan yang berada di bawah kendali individu dan membantu menjangkau tujuan organisasi.

Bonner dan Sprinkle (2002) menyatakan bahwa ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: variabel orang, variabel tugas, dan variabel lingkungan. Variabel orang termasuk atribut yang dimiliki seseorang sebelum melakukan tugas seperti konten pengetahuan, pengetahuan organisasi, kemampuan diri, kepercayaan diri, kepribadian, gaya kognitif, motivasi intrinsik, nilai-nilai budaya. Variabel tugas termasuk faktor-faktor yang bervariasi baik di dalam maupun di luar tugas, seperti kompleksitas, format presentasi, pengolahan dan respon modus siaga. Sementara itu, variabel lingkungan meliputi semua kondisi, keadaan, dan pengaruh di sekitar orang yang melakukan tugas tertentu, seperti tekanan waktu, akuntabilitas, tujuan yang telah ditetapkan dan umpan balik.

Panureksa sebagai badan pengawas internal LPD yang berfungsi sebagai auditor internal sekaligus sebagai bendesa adat, dibebankan atas tugas yang cukup banyak, dan permasalahan yang dihadapi beragam mulai dari penggelapan dana nasabah, kredit macet hingga tata kelola keuangan yang tidak transparan ini membuktikan bahwa tugas *panureksa* begitu kompleks. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan dan sulit, beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas yang tinggi dan sulit, sementara yang lain mempersepsikannya sebagai tugas yang mudah (Sanusi dan Iskandar, 2007). Penelitian Adi (2015) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap kinerja badan pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompleksnya tugas seorang badan pengawas maka semakin bertambahnya beban kerja sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja panureksa.

Menurut Mahdy (2012) untuk menghindari praktik-praktik seperti ini, diperlukan suatu kepribadian atau variabel yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan perilaku-perilaku menyimpang. Penelitian Leach-Lopez (2013) menunjukkan bahwa kepribadian memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja. Kinerja dapat dipengaruhi oleh variabel *locus of control* seperti yang dikemukakan oleh Rotter pada tahun 1996, bahwa *locus of control* dapat di artikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi dalam dirinya.

Menurut Ivancevich, dkk (2007:97),"*Locus of control* (pusat pengendalian) menentukan tingkatan sampai dimana individu menyakini bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka". Seseorang yang meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah kontrol dirinya sendiri tergolong *internal locus of control*. Sedangkan, seseorang yang mempercayai bahwa faktor luar atau lingkungan yang mempunyai pengaruh kontrol terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya tergolong *eksternal locus of control.* Penelitian Yuli (2017) menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja badan pengawas LPD.

Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial dan budaya kepada *Krama Desa Pakraman,* yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah unit LPD setiap tahunnya secara signifikan. Dari hanya delapan unit LPD pada tahun 1985 hingga pada tahun 2016 jumlah LPD sudah mencapai 1.443 unit yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali. Peningkatan jumlah LPD hingga 1.433 unit, tidak semuanya berkembang dengan baik, dari data yang didapatkan Pansus LPD tercatat 158 LPD (11,03%)

dinyatakan bangkrut karena tidak beroperasi lagi. Dari jumlah tersebut 23 LPD terdapat di Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem memiliki 190 LPD, hanya 92 LPD dinyatakan sehat, 48 LPD dinyatakan cukup sehat, 24 LPD kurang sehat, 3 LPD masuk kategori tidak sehat dan 23 LPD sudah dinyatakan tidak beroperasi lagi karena bangkrut atau *collaps*. (Bali Tribune, diakses pada 11 Pebruari 2019).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem tercatat per 30 September 2018 sebanyak lima unit LPD dari jumlah 20 unit LPD di Kecamatan Abang dinyatakan tidak beroperasi lagi. Jumlah ini telah mengalami peningkatan, dimana sebelumnya per Desember 2013 hanya satu LPD yang dinyatakan tidak beroperasi dan di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi lima unit LPD yang telah dinyatakan tidak beroperasi atau macet.

Selain jumlah LPD yang dinyatakan tidak beroperasi meningkat telah terjadi praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan LPD masih terjadi di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yaitu di Desa Sega, dengan melibatkan Ketua LPD *Desa Adat* Sega yang telah mengkorupsikan uang nasabah sebesar Rp.548.510.000,00. Kasus korupsi ini terungkap berdasarkan hasil audit petugas Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem. (Nusabali.com, Diakses pada tanggal 14 September 2018). Selain kasus korupsi, berdasarkan data dari LPLPD Kabupaten Karangasem jumlah LPD yang tidak beroperasi atau macet semakin banyak dari satu unit LPD menjadi lima LPD hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya karena permasalahan dalam usaha LPD dan audit yang dilakukan masih internal.

Melihat permasalahan yang terjadi keberadaan *panureksa* sebagai badan pengawas dalam menjaga eksistensi dan perkembangan LPD sangat diperlukan keberadaannya agar kegiatan operasional LPD senantiasa berjalan sesuai dengan tujuan berdirinya yaitu mensejahterakan masyarakat *desa pekraman*. Begitu kompleksnya peran dan tugas *panureksa* ditambah berfungsi sebagai auditor internal menyebabkan kinerja *panureksa* dituntut selalu baik dan berintegritas. Kompleksitas tugas sangat berpengaruh dalam tugas badan pengawas LPD, dimana jika semakin kompleks permasalahan LPD maka akan semakin berat beban kerja *panureksa* sehingga akan selalu berpengaruh terhadap kinerja badan pengawas baik positif maupun negatif (Adi, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompleksitas Tugas dan *Locus of Control* Terhadap Kinerja *Panureksa* Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Data kondisi LPD di Kecamatan Abang dalam LPLPD Kabupaten Karangasem per 30 September 2018, tercatat lima unit LPD mengalami kemacetan.
2. Terjadinya penyimpangan pengelolaan LPD di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang terjadi di LPD *Desa Adat* Sega yang telah mengkorupsikan uang nasabah sebesar Rp.548.510.000,00.

3. Kurangnya pengawasan internal yang dilakukan oleh badan pengawas (*panureksa)* LPD menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan pengelolaan LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, serta dengan mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada, penulis hanya membatasi masalah penelitian pada pengaruh kompleksitas tugas dan *locus of control* terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdaskan latar belakang masalah penelitian dan identifikasi masalah, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1) Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang?
2) Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang?
3) Apakah kompleksitas tugas dan *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdaskan latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang.

2) Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang.
3) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas dan *locus of control* terhadap kinerja *panureksa* pada LPD di Kecamatan Abang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun secara rinci manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi berupa sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis terutama di lingkungan Undiksha.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pentingnya kompleksitas tugas dan *locus of control* terhadap kinerja *panureksa sebagai* badan pengawas sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja panureksa selaku badan pengawas internal LPD.

b. Bagi Undiksha

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater juga bahan referensi serta bahan bacaan bagi yang berkepentingan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bahwa kinerja *panureksa* LPD sangat penting dalam pengelolaan LPD sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *krama* desa dan desa adat sebagai pemilik LPD.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA